

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang di susun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dalam perusahaan.(Baridwan Dalam Cole, 1990 : 3).

Sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.(Baridwan dalam Moscovici, 1990 : 4).

Sistem adalah suatu rangkaian kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait dan mempengaruhi (biasanya disebut dengan subsistem), yang di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Halim 1994 : 27).

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang berhubungan, yang dikembangkan sesuai dengan pola (rencana) guna melaksanakan aktifitas untuk suatu perusahaan. (Adikusuma, 1992 : 2).

Sistem sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai kegiatan atau fungsi utama perusahaan (Nugroho Widjajanto, 2001 : 2).

Sistem sebagai jaringan dari pada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk suatu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut, (Haryono, 1999 : 4).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan pengertian sistem merupakan unsur-unsur sistem yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.1.2 Karakteristik sistem

Sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. Komponen Sistem (*compenents*)

Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang sering disebut dengan subsistem yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Sub sistem itu sendiri yang mempunyai sifat-sifat dari sistem itu sendiri dalam menjalankan suatu fungsi serta akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batasan Sistem (*Boundary*)

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini juga memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan itu sendiri. Batas suatu sitstem yang menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan luar sistem (*Environment*)

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka pasti akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

d. Masukan sistem (*Input*)

Masukan adalah energi yang di masukan kedalam sistem. Masukan juga dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sedangkan masukan sinyal (*signal input*) adalah energi yang akan diproses untuk didapatkan keluarannya.

e. Keluaran sistem (*output*)

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembangunan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Misalnya untuk sistem computer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna merupakan hasil dari sisa pembuangan, sedang informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

f. Pengolahan sistem (*process*)

Suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah mana yang akan merubah

masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan – laporan lain yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen.

g. Sasaran sistem (*objectives*)

Sistem berguna jika mempunyai sasaran atau tujuan, dan sistem dikatakan berhasil jika keluaran – keluaran yang dihasilkan sistem dapat mencapai atau mengenai sasaran atau tujuan dari sistem itu sendiri.

2.2. Konsep Informasi

2.2.1. Pengertian informasi

Informasi adalah data yang diproses lebih jauh sehingga mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai pengaruh atas tindakan-tindakan, keputusan-keputusan sekarang atau masa akan datang. (Baridwan dalam Davis dan Olson 1995 : 28).

Informasi adalah data yang telah diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. (Baridwan dalam Gordon B. Davis, 1974 : 81).

Informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami didalam keputusan sekarang maupun masa depan. (Baridwan dalam Gordon B. Davis 1995 : 125).

Informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya (Baridwan dalam Cushing 1995 : 125).

Dari defenisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi dalam suatu organisasi dapat digolongkan sesuai dengan tujuan yaitu :

1. Informasi untuk pengambilan keputusan manajerial.
2. Informasi untuk pelaksanaan operasi harian.
3. Informasi untuk pihak ekstern.

2.2.2. Fungsi Informasi

Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil dari data yang dimasukan kedalam pengolahan. Akan tetapi dalam kebanyakan pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi bermacam-macam pilihan (Sutabri, 2004 : 19)

2.2.3. Jenis-Jenis Informasi

1. Informasi Berdasarkan Persyaratan

a. Informasi yang tepat waktu adalah bahwa informasi sudah ada sebelum suatu keputusan diambil. Informasi adalah bahan pengambilan keputusan.

b . Informasi yang relevan

Informasi yang disampaikan haruslah relevan, berkaitan dengan penerima sehingga informasi tersebut akan mendapat perhatian.

c. Informasi yang bernilai

Yang dimaksud dengan informasi yang bernilai adalah informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan.

d. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa suatu informasi harus dapat dipercaya (*reliable*).

2. Informasi Berdasarkan Dimensi Waktu

a. Informasi masa lalu

Informasi jenis ini adalah mengenai peristiwa lampau yang meskipun sangat jarang digunakan.

b. Informasi masa kini

Informasi masa kini adalah informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang

3. Informasi Berdasarkan Sasaran

a. Informasi individual

Yang dimaksud dengan informasi individual adalah informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi pembuat kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

b. Informasi komunitas

Yang dimaksud dengan informasi komunitas adalah informasi yang ditujukan kepada khalayak diluar organisasi, suatu kelompok tertentu masyarakat.

2.2.4. Pemakaian Informasi

Pemakaian informasi merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi karena sesungguhnya produk informasi didayagunakan sesuai dengan kebutuhannya. Produk informasi dapat dinyatakan bermanfaat bila informasi itu memenuhi kebutuhan pemakainya. Penyampaian produk informasi kepada pemakai informasi pada gilirannya akan menimbulkan reaksi atau respon penerimaan atau penolakan terhadap informasi tersebut. Bila ditinjau dari sudut pemakai, informasi akan sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat dua golongan utama para pemakai informasi akuntansi, yaitu pihak ekstern organisasi perusahaan dan pihak intern organisasi perusahaan. Manajemen sebagai pihak intern perusahaan lebih memusatkan perhatian pada relevansi informasi untuk pengendalian manajerial dan keputusan manajemen. Sedangkan pihak ekstern pada umumnya lebih menitik beratkan pada pengukuran pendapatan untuk suatu periode khusus baik bulanan maupun tahunan untuk membuat keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Informasi tersebut

dapat diperoleh dalam laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan pada akhir periode.

Secara umum *Horngren* dkk (1996 : 4) merumuskan pemakai dan manfaat informasi akuntansi dalam tiga (3) kategori, yaitu :

1. Manajer internal, yang menggunakan informasi untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian rutin operasi.
2. Manajer internal, yang menggunakan informasi untuk membuat keputusan-keputusan non rutin (seperti investasi pada peralatan, penetapan harga produk dan jasa) dan memformulasikan seluruh kebijaksanaan/ keseluruhan dan rencana- rencana jangka panjang.
3. Pihak luar, seperti investor dan pemerintah yang berwenang yang menggunakan informasi untuk membuat keputusan tentang perusahaan. Sementara itu Ikatan Akuntansi Indonesia (1994 : 3) mengelompokkan pemakai dan manfaat informasi akuntansi kedalam beberapa kelompok berikut :

1. Investor

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan memerlukan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan disamping kemampuan perusahaan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor lainnya

Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama bila terlibat dalam perjanjian dengan perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktifitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar penyusunan statistik.

7. Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, trend dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktifitasnya.

2.3 Konsep Sistem Informasi

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan (Baridwan 1995 : 83).

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan- laporan yang diperlukan (Sutabri 2004 : 36)

Dari pengertian di atas maka diambil kesimpulan bahwa sistem informasi adalah penerapan sistem di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Fungsi sistem informasi bertanggungjawab atas pemrosesan data. Pemrosesan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang paling mendasar di setiap organisasi.

2.3.2 Komponen dan Tipe Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari komponen- komponen dengan istilah blok bangunan (*building block*) yang terdiri dari :

1. Blok masukan (*input blok*)

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang dimaksud dengan input disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen- dokumen dasar.

2. Blok model (*model block*)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok keluaran (*output block*)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk tingkatan manajemen serta pemakai semua sistem.

4. Blok teknologi (*technology block*)

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. Blok basis data (*database block*)

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras computer dan perangkat lunak digunakan untuk memanipulasinya.

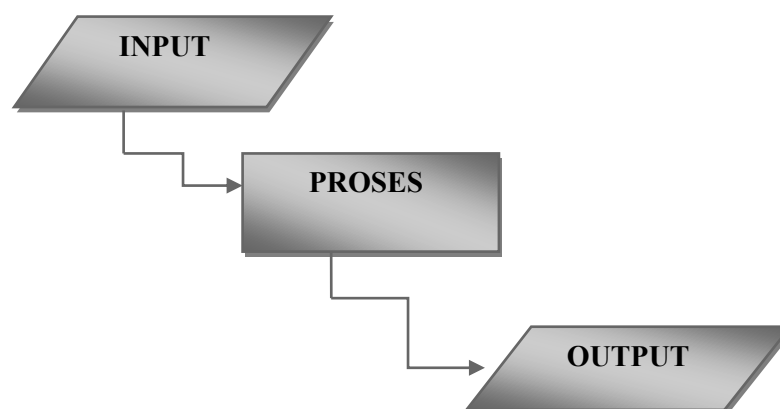
6. Blok Kendali (*control block*)

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan ditetapkan untuk menyakinkan bahwa hal- hal yang dapat merusak sistem dicegah dan bila terlanjur terjadi maka kesalahan- kesalahan dapat dengan cepat diatasi.

2.3.3 Pengelolaan Sistem Informasi

Pengelolaan sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi manajemen, sebagaimana halnya pengelolaan ketenagaan, keuangan, organisasi, dan tata laksana. Seringkali dapat diasumsikan bahwa pengelolaan sistem informasi merupakan factor kunci bagi keteerlaksanaan dan keberhasilan maajemen.

Cara pengelolaan sistem informasi adalah :



Komponen-komponen/unsur-unsur yang harus ada dalam Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari :

1. Hardware
2. Software
3. Brainware
4. Data
5. User
6. Procedure

Salah satu perangkat yang paling penting dari sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat erat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya.

- a. Manajemen Level Atas : untuk perencanaan strategis, kebijakan dan pengambilan keputusan.
- b. Manajemen Level Menengah : untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan.
- c. Manajemen Level Bawah : untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan;
- d. Keputusan ;
- e. Operator : untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan.

2.3.4 Pengendalian Sistem Informasi

Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengelola sistem informasi perlu memahami dan memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan kegiatan pengendalian sistem informasi, yakni :

1. Kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi
2. Kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi
3. Kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi
4. Kemampuan melaksanakan kegiatan koordinasi

Bila pengelola sistem informasi memiliki kemampuan tersebut maka pelaksanaan pengelolaan sistem informasi akan terjamin dan lancar guna mendukung keberhasilan program organisasi. Namun bila kegiatan perencanaan, proses transformasi informasi, pengorganisasian pelaksana dan koordinasi lepas kendali, maka bukan saja tidak berhasil mencapai tujuan bahkan akan membahayakan proses manajemen yang didukung sistem informasi tersebut.

2.3.5 Penilaian Sistem Informasi

Dalam pengelolaan sistem informasi dapat dilihat bahwa komponen penilaian tergolong sebagai komponen yang strategis, yang berarti ada kaitan sistematis dengan komponen masukan (*input*), komponen proses, dan komponen produk. Kegiatan pengelolaan sistem

informasi dianggap efisien dan efektif bila komponen perencanaan disusun dengan cermat dan teliti berdasarkan data objektif dan akurat.

Fungsi utama dari penilaian informasi adalah menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Ada tiga (3) strategis penilaian dalam sistem informasi yaitu :

1. Strategi penilaian masukan, yang bertujuan untuk menilai perencanaan informasi yang disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata.
2. Strategi penilaian proses, yang bertujuan menilai pelaksanaan transformasi informasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penilaian, penyajian dan penyebarluasan, dokumentasi, dan komunikasi yang secara keseluruhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan.
3. Strategi penilaian produk, yang bertujuan menilai produk- produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi.

2.4 Konsep Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.(
www.djkd.kemendagri.go.id : 2012)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) juga merupakan salah satu manifestasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, berkaitan dengan penguatan persamaan persepsi dalam interpretasi dan implementasi berbagai peraturan perundang- undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Program Aplikasi SIPKD juga merupakan aplikasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE 900.122.BAKD tentang “ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Dan Implementasi SIPKD Dan Regional SIKD “ dan SE Menteri Dalam Negeri Lainnya Tentang Implementasi SIPKD yaitu SE.900.806.BAKD, SE.900.360.BAKD.

Maksud dan Tujuan Dari Pelaksanaan Implementasi Program Aplikasi SIPKD ini adalah dapat terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan basis komputerisasi dan Terintegrasi sehingga proses Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien mulai dari Proses Penyusunan APBD, Pelaksanaan APBD serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah. Aplikasi SIPKD

ini adalah dengan berbasiskan Regulasi Pusat yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008.

2.4.2 Ruang Lingkup Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Aplikasi valid 49 yaitu aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) antara lain :

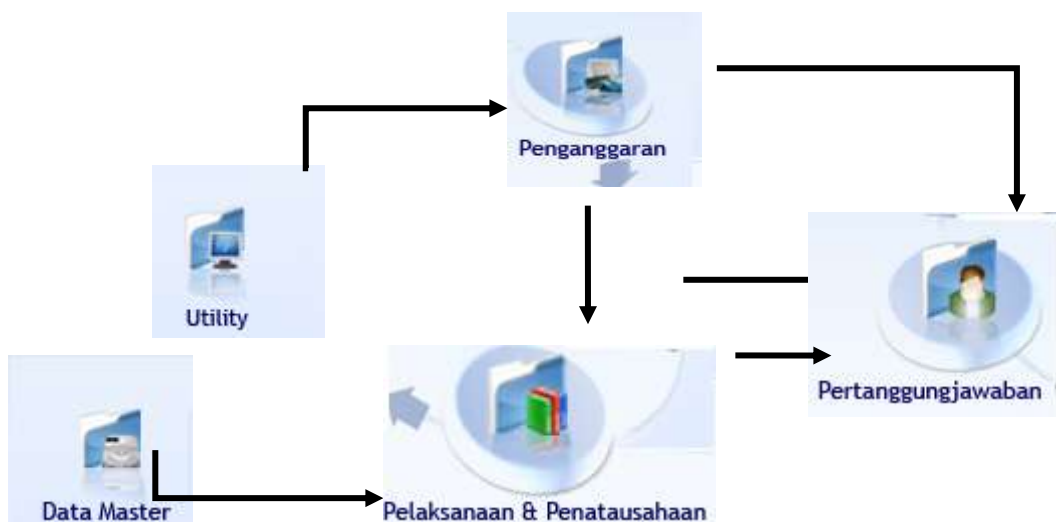
1. Penyusunan Anggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Penyusunan Anggaran Perubahan
4. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran

Aplikasi valid 49 terdiri dari beberapa modul antara lain :

- a. 3 (tiga) modul utama yaitu Modul Anggaran, Modul Kas dan Modul Pembukuan.
- b. 2 (dua) modul penunjang, yaitu Modul *Utility* dan Modul *Data Master*.

Hubungan Antar Modul

Perlu diketahui bahwa ke 5 (lima) modul tersebut saling terkait satu sama lain. Keterkaitan modul-modul tersebut dihubungkan pada beberapa data yang secara langsung digunakan oleh beberapa modul tertentu di beberapa menu. Modul *Utility* dan Modul *Data Master* dikatakan sebagai modul penunjang, hal ini dikarenakan kedua modul tersebut secara struktur data dan aliran menu menunjang terhadap kebutuhan modul utama atau dengan kata lain akan terdapat permasalahan dalam prosesnya jika data pada modul *Data Master* dan modul *Utility* tidak dilaksanakan terlebih dahulu.



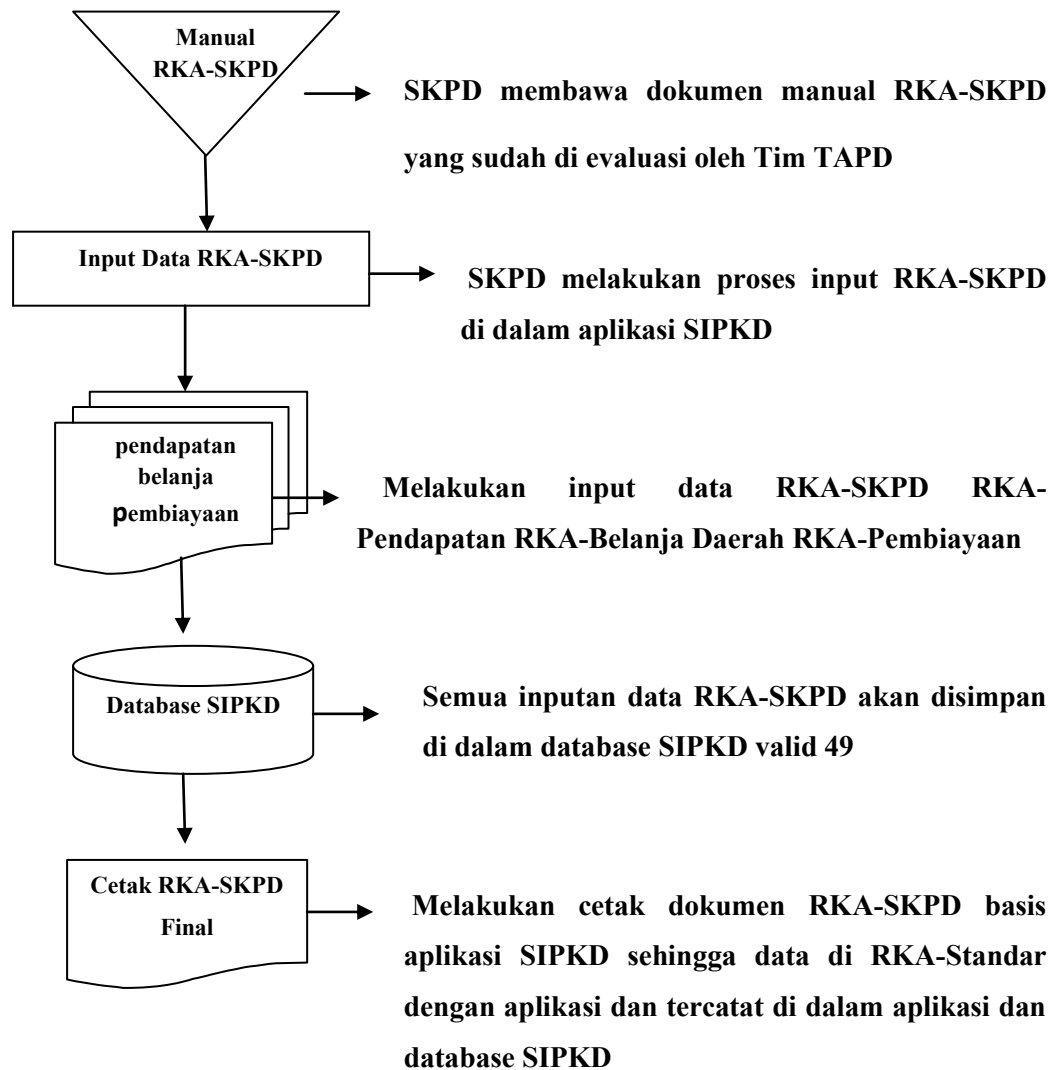
2.4.3 Bagan Alir Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Ruang lingkup dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah :

- a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- b. Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (RKA-SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
- c. Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD)
- d. Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD)
- e. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari ruang lingkup diatas dalam operasionalisasinya akan menggunakan alat bantu yaitu aplikasi Modul Penganggaran. Adapun aplikasi tersebut aliran data dimulai dari penyusunan KUA, PPA sampai dengan akhirnya menghasilkan APBD.

A. BAGAN ALIR ENTRIAN APLIKASI SIPKD PADA BAGIAN ANGGARAN



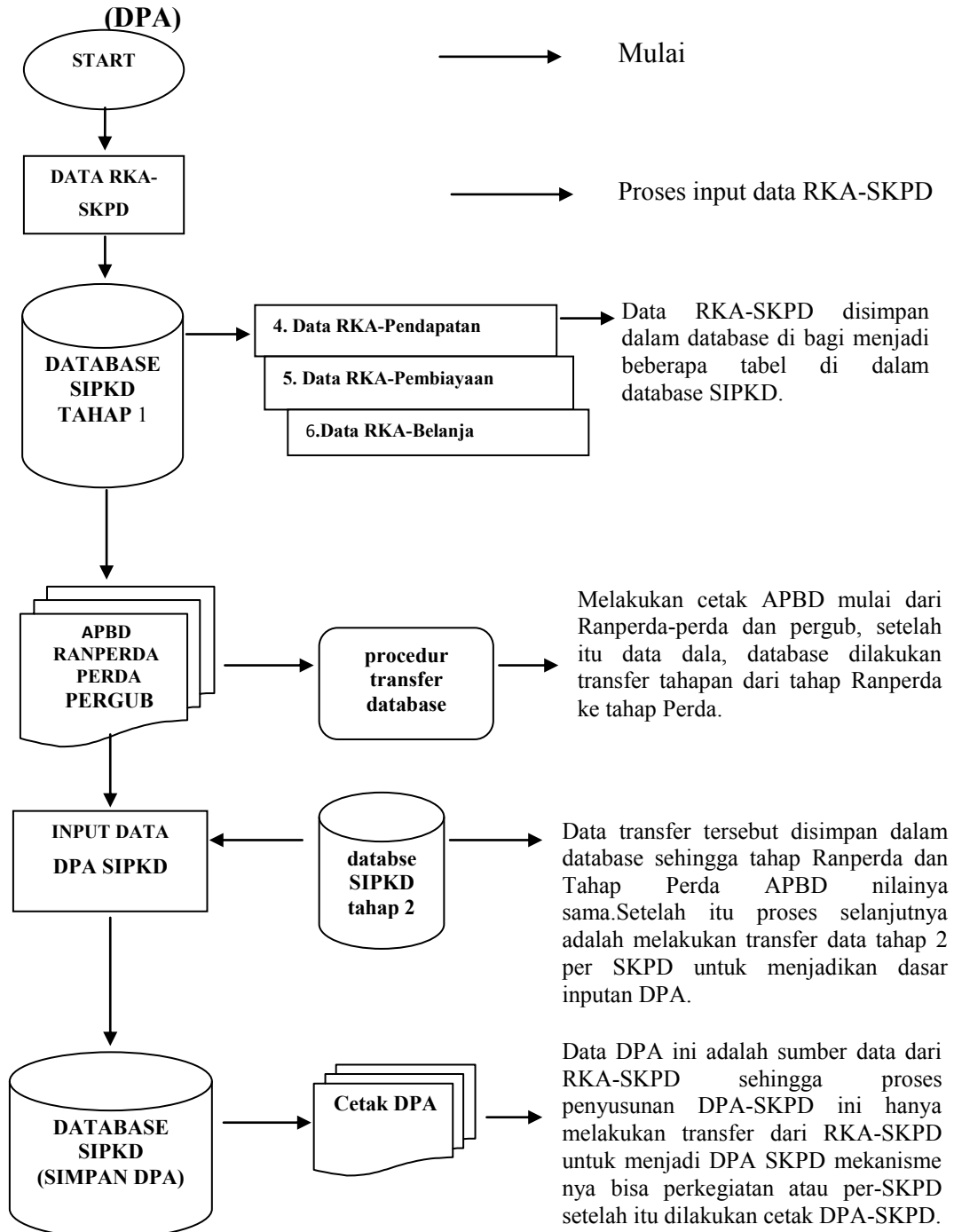
Gambar 2.1 Bagan Alir Entrian Aplikasi SIPKD pada Bagian Anggaran.

Penjelasan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan Evaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) kepada TIM TAPD, jika dari dokumen manual tersebut sudah 100% disetujui Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)-nya maka dokumen manual tersebut akan diaplikasikan ke sistem SIPKD.
2. Operator SKPD melakukan input data Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan pengawasan oleh bagian anggaran.
3. Operator melakukan semua Proses Input Data yaitu Kode Rekening, Penjabaran atau Rincian detail dari masing- masing Kode Rekening dengan Pengawasan oleh Bagian Anggaran. Semua jenis rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) harus di input ke Aplikasi SIPKD baik Rencana Kegiatan Anggaran- Pendapatan, Rencana Kegiatan Anggaran-Belanja tidak langsung, Rencana Kegiatan Anggaran-Belanja langsung, Rencana Kegiatan Anggaran-Penerimaan Pembiayaan, Rencana Kegiatan Anggaran- Pengeluaran Pembiayaan.

4. Semua data hasil entrain akan secara otomatis tersimpan dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
5. Setelah semua data Ter-input maka SKPD melakukan cetak ulang Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah karena yang diakui atau sah adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran- hasil entrain dan hasil dari SIPKD.

B. BAGAN ALIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA)



Gambar 2.2 Bagan Alir APBD dan DPA

Penjelasan dari Alur di atas adalah Proses Pencetakan Ranperda-Perda dan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya mengambil dari data Rencana Kegiatan dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang sudah final dan dihitung semuanya dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), setelah itu dilakukan transfer data dari Tahapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (input data RKA-SKPD) ke Tahap Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahap ini akan dilakukan Proses Input Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang hanya melakukan Transfer dari Rencana Kegiatan dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Tahap Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) ke Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan hal ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak perlu melakukan input ulang Perkode Rekening hanya mengambil data dari Rencana Kegiatan dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang sudah di input dan sudah ditransfer ke Tahapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD).

2.5 Konsep Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005)

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah dalam Halim, 2004 : 18).

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber- sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain- lain atau hak untuk menerima sumber- sumber penerimaan lain seperti : Dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan- tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Sejak masa reformasi masalah Keuangan Daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai Ketentuan/ Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keuangan daerah dikelola melalui Manajemen Keuangan Daerah. Adapun arti dari Keuangan Daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber- sumber daya/ kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut sedangkan alat untuk melaksanakan Manajemen Keuangan Daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.

2.6 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

2.6.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup :

1. Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkn pada perusahaan daerah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

2.6.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 4

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman padaperaturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Deki Perdana	Pengaruh Implementasi SIPKD Terhadap Transparasi Dan Akuntabilitas Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	Analisis Kualitatif	Implementasi SIPKD mempunyai pengaruh positif terhadap transparasi dan akuntabilitas informasi akuntansi pemerintah daerah.
2.	Nurfalah	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Pendekatan User Usability di Dinas Pemerintah Kota Bandung.	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap user usability di Dinas Pemerintah Kota Bandung.
3.	Femi Bagoë	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Kualitatif	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, maka dalam pelaksanaannya Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas, implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

